



Tetap Lancar Berjualan Meski Pindahan

PKL Malioboro Bantah Klaim Sudah Sepakat Relokasi

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengklaim sebagian besar komunitas pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro setuju dengan rencana relokasi. Hanya saja, dibutuhkan ruang khusus untuk membahas waktu terkait pelaksanaan proses penataan.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, Dinas Kebudayaan sudah melakukan upaya sosialisasi yang menasar seluruh PKL, melalui paguyuban pedagang yang menaungi. Menurutnya, mayoritas komunitas mengaku sepakat, untuk dilakukan penataan ke depannya.

"Sebagian besar, menurut laporan dari Disbud itu sudah sepakat. Hampir semua komunitas. Hanya satu, atau dua ya, yang belum sepakat terkait tanggalnya. Jadi, kalau untuk relokasi sepakat," ucap Heroe, Rabu (1/12).

Walaupun begitu, ia tak menampik, masih ada beberapa PKL yang merasa ragu untuk dipindahkan, karena kekhawatiran dagangannya tidak laku di tempat baru. Padahal, Wakil menandatangani, Pemkot Yogyakarta sudah memikirkan langkah agar mereka bisa tetap berjualan di sana.

"Harapannya, semua saling menghormati, karena ini kan proses untuk kebaikan bersama. Para pedagang tetap kita perhitungkan. Bagaimanapun, supaya mereka berdagang, dan tetap di tempat relokasi," terangnya.

Tapi, kadang-kadang sesuatu yang baru itu banyak yang belum mengerti, nanti apa yang terjadi. Biasanya jualan di trotoar dan lorong toko terus harus pindah, itu mungkin butuh penyelesaian bagi PKL, ya," lanjut Heroe.

Siapkan stimulus
Dia memastikan Pemkot bakal terus melakukan eva-

Sebagian besar, menurut laporan dari Disbud itu sudah sepakat. Hampir semua komunitas. Hanya satu, atau dua ya, yang belum sepakat terkait tanggalnya.

Heroe Poerwadi
Wakil Wali Kota Yogyakarta

luasi, terhadap tahap-tahap relokasi, supaya aktivitas ekonomi para PKL, dan pemilik toko-toko di sepanjang Malioboro tetap berjalan maksimal. Khusus bagi PKL, pihaknya telah menyiapkan stimulus tersendiri.

"Ada itu, kemarin seperti ini, ya, dengan tidak ditarik retribusi, Dinas Kebudayaan yang paham teknisnya. Tapi, jelas ada stimulus untuk PKL," ujarnya.

Kalangan PKL di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, membantah mengenai kabar sebagian besar komunitas, atau paguyuban yang sudah menemui kata sepakat untuk direlokasi ke tempat lain.

Ketua Komunitas Angkringan Malioboro, Yati Dimanto pun menegaskan, bahwa klaim tersebut tidaklah benar. Pasalnya, sampai sejauh ini, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, di mana mayoritas paguyuban menolak wacana relokasi. "Tidak benar ada informasi beberapa paguyuban secara resmi, dan bulat menyatakan menerima relokasi. Padahal, sebagian besar malah menyatakan keberatan," ungkapnya.

"Kemudian, ada pula paguyuban yang belum mengambil keputusan, karena masih dalam proses menjangkau aspirasi dari anggota komunitasnya," tambah Yati.

Sikap keberatan tersebut, katanya, karena menimbang dampak buruk sosial, dan ekonomi, yang sangat mungkin terjadi pada ribuan keluarga PKL. Belum lagi, kebijakan relokasi diputuskan secara sepihak oleh pemerintah, tanpa melibatkan paguyuban pedagang.

"Pada dasarnya, PKL di kawasan Malioboro keberatan, dengan rencana relokasi yang akan dilakukan pemerintah. PKL lebih memilih untuk ditata, tanpa dipindah. Dibuat indah, tanpa memindah," katanya.

Walaupun begitu, ia meyakini, pemerintah akan membuka lebar-lebar pintu dialog, dan mendengarkan aspirasi dari PKL. Apalagi, selaras dengan statement yang dikeluarkan Pemkot Yogyakarta, eksekutif belum menentukan tenggat waktu pelaksanaan penataan, dan fokus pada upaya sosialisasi. "Lagipula, saat ini, kami baru bangun dari mati suri, dan tidur panjang. Baru mulai berjalan, kebijakan relokasi sudah di hadapan. Bagaimana kami tidak sedih, sedih, dan miris, ya," katanya.

Dijelaskannya, pada Sabtu (27/11) lalu, pihaknya pun sudah memfasilitasi sebuah forum, atau rembuk lintas komunitas di kawasan Malioboro. Dalam agenda itu, semua pihak bersinergi untuk membahas langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memperjuangkan nasib.

"Kita merembukan langkah-langkah konkrit bersama dalam memperjuangkan nasib kami. Langkah-langkah yang terukur sesuai dengan budaya Yogyakarta, yang santun, dan damai tentunya," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
4. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005